

Andika Wijaya, S.H.

HUKUM JAMINAN SOSIAL INDONESIA



Penerbit

SINAR GRAFIKA

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL	1
A. Istilah Sistem Jaminan Sosial Nasional	1
B. Dasar Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional	2
C. Asas, Tujuan dan Prinsip	3
D. Para Pihak dalam Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional	7
E. Kepesertaan dan Iuran Jaminan Sosial Nasional	10
1. Kepesertaan Pekerja	10
2. Pembagian Peserta Menurut Perpres No. 109 Tahun 2013	13
3. Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial	17
4. Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran	20
F. Hak dan Kewajiban Peserta	23
BAB 2 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	26
A. Pengertian	26
B. Dasar Hukum BPJS	26
C. Asas, Tujuan, dan Prinsip BPJS	29
D. Pembentukan dan Ruang Lingkup	31
E. Status dan Tempat Kedudukan	31
F. Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban	33

G.	Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran	35
H.	Sanksi Administratif Atas Kelalaian Pendaftaran BPJS	40
I.	Pengawasan terhadap BPJS	43
J.	Kedudukan UU Jamsostek Pasca UU BPJS	43
BAB 3	JAMINAN KESEHATAN	46
A.	Pengertian Jaminan Kesehatan	46
B.	Dasar Hukum Jaminan Kesehatan	47
C.	Prinsip dan Tujuan Jaminan Kesehatan	48
D.	Kepesertaan dan Iuran	50
1.	Pembagian Peserta Menurut Perpres Jamkes	51
2.	Sifat Kepesertaan Jaminan Kesehatan	54
3.	Pendaftaran dan Perubahan Data Kepesertaan	55
4.	Ketentuan Umum Iuran Jaminan Kesehatan	57
5.	Prosedur Pembayaran Iuran dan Denda Keterlambatan	61
6.	Kekurangan dan Kelebihan Iuran	63
E.	Manfaat Jaminan Kesehatan	63
1.	Pembagian Manfaat Jaminan Kesehatan Secara Umum	65
2.	Manfaat Pelayanan Promotif dan Preventif	66
3.	Pelayanan Kesehatan yang Dijamin dan Tidak Dijamin	67
4.	Upgrade Kelas Pelayanan	69
BAB 4	JAMINAN KECELAKAAN KERJA	72
A.	Pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja	72
B.	Prinsip dan Tujuan Jaminan Kecelakaan Kerja	73
C.	Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja	74
1.	Pembagian Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja Secara Umum	75
2.	Prosedur Pendaftaran Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara	76
3.	Prosedur Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah	82

D.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	84
1.	Ketentuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Secara Umum	85
2.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Penerima Upah	86
3.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Bukan Penerima Upah	88
E.	Kepesertaan dan Iuran Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi	89
F.	Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja	93
1.	Muncul dan Kedaluwarsanya Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja	93
2.	Manfaat Berupa Pelayanan Kesehatan	94
3.	Manfaat Berupa Santunan Uang	96
4.	Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Hal Magang, Siswa Kerja Praktik, Tenaga Honorer, atau Narapidana yang Dipekerjakan	98
5.	Konsekuensi Pemberi Kerja yang Tidak Mendaftar-kan Pekerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja Apabila Terjadi Risiko	99
G.	Prosedur Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja	100
H.	Prosedur Pelaporan Terkait Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja	104
I.	Penanganan Keluhan	106
J.	Ketentuan Sanksi Administratif	107
K.	Pengawasan Ketenagakerjaan	109
BAB 5	JAMINAN HARI TUA	112
A.	Pengertian Jaminan Hari Tua	112
B.	Prinsip dan Tujuan Jaminan Hari Tua	113
C.	Kepesertaan dan Prosedur Pendaftaran Jaminan Hari Tua	114
1.	Pembagian Peserta Program Jaminan Hari Tua	114
2.	Ketentuan Imperatif Terkait Pendaftaran Jaminan Hari Tua	115

3.	Prosedur Pendaftaran Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara	117
4.	Prosedur Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah	121
D.	Prosedur Iuran Jaminan Hari Tua	123
1.	Besaran Iuran Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara	123
2.	Besaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah	124
3.	Prosedur Pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara	126
4.	Prosedur Pembayaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah	127
E.	Manfaat Jaminan Hari Tua dan Prosedur Pembayaranannya	128
1.	Manfaat Jaminan Hari Tua	128
2.	Prosedur Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua	131
3.	Penundaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua	132
F.	Ketentuan Sanksi Administratif	133
G.	Pengawasan Ketenagakerjaan	134

BAB 6	JAMINAN PENSIUN	138
A.	Pengertian Jaminan Pensiun	138
B.	Prinsip dan Tujuan Jaminan Pensiun	139
C.	Kepesertaan dan Prosedur Pendaftaran Jaminan Pensiun	140
1.	Kepesertaan Jaminan Pensiun	140
2.	Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Pensiun	141
3.	Perubahan Data Kepesertaan	144
D.	Iuran dan Prosedur Pembayaranannya	145
E.	Penerima Manfaat Jaminan Pensiun	148
F.	Ketentuan tentang Usia Pensiun	150
G.	Manfaat Jaminan Pensiun	151
1.	Jaminan Pensiun Hari Tua	154
2.	Jaminan Pensiun Cacat	155
3.	Jaminan Pensiun Janda atau Duda	156

4. Jaminan Pensiun Anak	158
5. Jaminan Pensiun Orang Tua	159
H. Hak Peserta Jika Masa Iur Kurang dari 15 Tahun	160
I. Sanksi Administratif	160
J. Pengawasan Ketenagakerjaan	161
BAB 7 JAMINAN KEMATIAN	164
A. Pengertian	164
B. Prinsip dan Tujuan Jaminan Kematian	165
C. Kepesertaan dan Iuran Jaminan Kematian	166
D. Kepesertaan dan Iuran Jaminan Kematian Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi	168
E. Manfaat Jaminan Kematian dan Prosedur Pembayaran Manfaat	169
1. Manfaat Jaminan Kematian Secara Umum	169
2. Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian	170
3. Ketentuan Bagi Pemberi Kerja yang Melalaikan Kewajibannya	171
4. Ketentuan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang Menunggak Iuran	173
F. Sanksi Administratif	174
G. Pengawasan Ketenagakerjaan	176
BAB 8 PENYELESAIAN SENGKETA	177
BAGIAN I	
SENGKETA ANTARA PESERTA DAN BPJS	
A. Penyelesaian Pengaduan	178
1. Pengaduan Peserta BPJS Kesehatan	178
2. Pengaduan Peserta BPJS Ketenagakerjaan	180
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	182
C. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	185
1. Pengertian Pengadilan Menurut UU No. 24 Tahun 2011 jo. UU Peradilan Umum	185

2. Jenis Perkara Sengketa (<i>Contentiosa</i>) Perdata	186
3. Bentuk Gugatan: Perbuatan Melanggar Hukum ...	187
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015	192
5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Acara Perdata Biasa	196

BAGIAN II

SENGKETA ANTARA PEKERJA DAN PEMBERI KERJA

D. Sengketa Hubungan Industrial	208
E. Prosedur Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan	212
1. Penyelesaian Melalui Bipartit	212
2. Penyelesaian Melalui Mediasi	214
F. Prosedur Penyelesaian Perkara Melalui Pengadilan Hubungan Industrial	216
G. Upaya Hukum	219
H. Contoh Kasus Sengketa Jaminan Sosial	220
1. Putusan No. 371 K/Pdt.Sus/2010 Tanggal 7 Juni 2010 jo. Putusan No. 137/G/2008/PHI.MDN Tanggal 23 Maret 2009	220
2. Putusan No. 631 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 21 Januari 2015 jo. Putusan No. 10/G.2014/ PHI.PN.PTK Tanggal 30 April 2014	225
3. Putusan No. 348K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 25 Juni 2015 jo. Putusan No. 14/Pdt.Sus-Phi/2014/PN.Plk Tanggal 25 Februari 2015	232

BAB 9 KETENTUAN PIDANA	238
A. Pengantar Umum	238
B. Ketentuan Pidana Berdasarkan Pasal 54 UU BPJS	239
C. Ketentuan Pidana Berdasarkan Pasal 55 UU BPJS	241

DAFTAR PUSTAKA	253
PROFIL PENULIS	259